

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Peran yang masih dominan dari peradilan formal dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing melalui pengadilan negeri merupakan salah satu masalah yang sulit diselesaikan. Dalam praktiknya, sering kali muncul situasi di mana berbagai pihak terlibat, termasuk pihak yang harus melaksanakan eksekusi dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dan menolak segala hal yang menjadi dasar dari keputusan eksekusi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pengadilan nasional masih kurang kompeten dalam melaksanakan penghargaan arbitrase internasional, sehingga menyulitkan pelaksanaannya. Perbedaan utamanya terletak pada fakta bahwa kontrak dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga pelaksanaan isi kontrak jarang menimbulkan masalah. Namun, keputusan arbitrase dibuat oleh pihak ketiga dan sering kali mendapatkan keberatan terutama dari pihak yang kalah, yang menyebabkan adanya keberatan terhadap keputusan arbitrase yang dikeluarkan setelahnya. Masalah ini merupakan karakteristik utama kelemahan dalam arbitrase internasional.
2. Penolakan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional berdampak serius terhadap investasi asing di Indonesia. Ketidakpastian hukum, kehilangan kepercayaan investor, risiko politik, dan penurunan investasi langsung asing (FDI) adalah beberapa konsekuensi yang mungkin timbul. Implikasinya terhadap iklim investasi di Indonesia meliputi penurunan kepercayaan investor, penurunan minat investasi, gangguan pada pertumbuhan ekonomi, dan penurunan daya saing. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum yang solid dan memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian sengketa investasi sesuai komitmen internasional, guna mempertahankan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor asing.

### **B. SARAN**

Indonesia diharapkan bisa menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengembangkan sistem arbitrase yang kuat dan efektif, Dengan cara dengan merevisi dan memperbaharui peraturan perundang-undangan arbitrase, membentuk sistem akreditasi nasional untuk arbiter, dan mendorong pembentukan lebih banyak lembaga arbitrase, Indonesia dapat memperbaiki sistem arbitrasenya. Meskipun ada tantangan

dalam mengimplementasikan solusi ini, mereka perlu mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang andal dan efektif yang menguntungkan individu dan bisnis di Indonesia.